

ANALISIS KUALITAS PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PADA *WEBSITE* PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2018-2021)

Purnama Sari Harahap, Tri Jatmiko Wahyu Prabowo¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

Disclosure of information in financial reports is part of the accountability and transparency of Regional Government Financial Reports to the public. This study aims to determine the effect of transparency, accountability, accessibility, and population on the quality of disclosure of financial reports on local government websites. The population in this study were all district/city local governments in the province of West Nusa Tenggara. The sample used in this study was through purposive sampling so that a total of 36 (thirty six) samples were obtained. The data analysis technique used in this study is descriptive statistics, classic assumption test, multiple linear regression analysis using SPSS version 25. The results of the study prove that the variables of transparency, accountability, accessibility and population have a significant influence on the quality of financial statement disclosure on government websites.

Keywords: Disclosure of Financial Statements, Web-based Disclosure, Transparency, Accountability, Accessibility, Population

PENDAHULUAN

Internet Financial Reporting (IFR) ataupun publikasi laporan keuangan pemerintah melalui *e-government* adalah wujud pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah terhadap publik (Nosihana & Yaya, 2016). Peraturan Pemerintah Pasal 13 Nomor 65 tahun 2010 menyebutkan bahwasanya kemajuan serta perkembangan teknologi informasi wajib dimanfaatkan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi keuangan lewat *website* resmi. Tetapi, peraturan mengenai pengungkapan keuangan pemda dalam *website* masih berlaku opsional.

Website mendukung komunikasi informasi yang efektif kepada masyarakat umum dan memengaruhi aspek komunikasi pelaporan keuangan. Penggunaan internet mempunyai beberapa keuntungan seperti data akuntansi secara elektronik bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Di Indonesia, informasi diungkapkan lewat *website* pemerintah daerah dalam berbagai cara, sebagian pemerintah menyatakan informasi secara lengkap serta yang lainnya menyatakan sedikit atau minimum. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188-52/1797/SJ/2012 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesiaa Tahun 2012) terkait Peningkatan Transparansi Pengelolaan APBD mengatur mengenai kewajiban kepala daerah untuk menyusun katalog yang transparan konten manajemen APBD dalam *website* regional. Salah satu tujuan pembuatan lokal *website* pemerintah ialah untuk membuat jaringan informasi pemda yang terintegrasi dengan aplikasi berbasis IT di internet. Hal ini bertujuan untuk membantu pembangunan daerah dalam menjalankan fungsinya untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat daerah.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk mendistribusikan informasi publik kepada masyarakat melalui cara yang mudah diakses serta menggunakan Bahasa sederhana sehingga

¹ Corresponding author

mudah dimengerti. Dalam hal ini, terdapat kemudahan yang tinggi bagi masyarakat karena pengguna dapat menjumpai dan meninjau informasi finansial dan non finansial pada *website* pemda. Oleh sebab itu, pemerintah daerah membutuhkan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia untuk membangun infrastruktur dalam bidang IT.

Nor *et al.* (2019) pada tahun 2015 melaksanakan pengamatan terhadap *website* pemda di Indonesia, ditunjukkan dari 34 pemerintah provinsi di Indonesia hanya 16 pemerintah daerah yang mempublikasikan laporan keuangan di tiap-tiap *website*. Tetapi pada tahun 2016 total tersebut telah berkembang menjadi 17 pemerintah daerah. Sementara hasil tahun 2018 observasi mencatat bahwa 20 provinsi mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah di *website*, 11 provinsi tidak menyampaikan laporan keuangan dan 3 dari 34 provinsi tidak memiliki akses ke *website* pemerintah daerah. Hal ini mengungkapkan dalam pengungkapan informasi laporan keuangan melalui *e-government* masih terdapat kesenjangan serta teknologi internet oleh pemda yang belum optimal dimanfaatkan. Namun, pemerintah diwajibkan untuk memberikan laporan keuangan kepada publik sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen. Salah satu cara untuk mengungkapkan komitmen pemerintah terhadap transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran serta pengelolaan pemerintahan ialah melalui publikasi laporan keuangan dengan *website*.

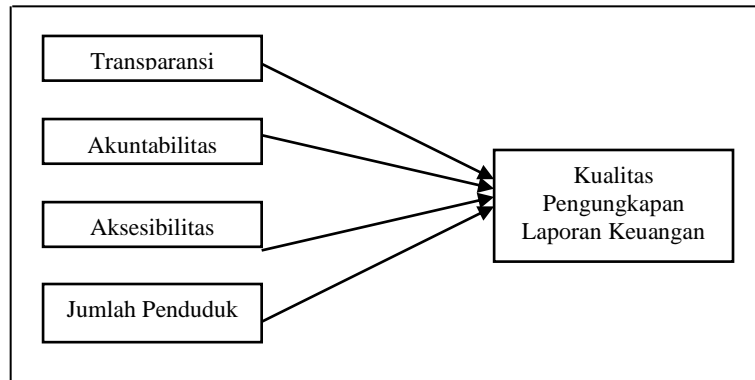
Hampir seluruh pemda di Indonesia mempunyai *website* resmi. Tetapi, penggunaan *website* tidak dimanfaatkan oleh seluruh pemerintah daerah dengan optimal untuk memaksimalkan aktivitas sosialisasi peraturan, pelayanan publik, dan sebagai sarana komunikasi interaktif bagi masyarakat. Penggunaan *website* sebagai sarana implementasi *e-government* pada Indonesia masih belum optimum. Pemerintah daerah belum menjalankan *website* melalui cara terbaik. Informasi yang terjadi kurang actual dan sedikitnya informasi layanan publik. Hal ini menunjukkan jika mengenai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah belum bertindak secara transparan serta akuntabel untuk menginformasikan terhadap publik.

Pengungkapan laporan keuangan dengan *website* pemda merupakan salah satu wujud akuntabilitas yang efisien, cepat serta ekonomis. Laporan keuangan adalah wujud konkret dalam pertanggungjawaban pemerintah serta pertanggungjawaban kepada publik, akibatnya data yang disediakan harus dibuktikan keakuratannya dengan tidak adanya manipulasi anggaran yang bisa menyusahkan masyarakat (Nosihana & Yaya, 2016). Dengan begitu, memberikan tanda positif terhadap masyarakat untuk mengelola daerah yang transparan dan akuntabel.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori agensi (*agency theory*) memberikan perhatian untuk memastikan bahwa dalam setiap organisasi, individu yang dalam hal ini dikatakan sebagai agen akan berperan sebagai pihak yang dipercaya oleh individu atau sekumpulan individu lain yang diberi wewenang oleh agen tersebut, yang dikatakan sebagai prinsipal. Hubungan *agent* dan *principal* atau sering disebut *the principal-agent relationship* sering menimbulkan masalah keagenan. Masalah ini sering muncul karena adanya perbedaan tujuan antara *agent* dan *principal*. Oleh sebab itu, diperlukan suatu mekanisme yang memungkinkan *principal* untuk senantiasa memantau *agent*. Teori keagenan membantu untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah terkait dengan masalah asimetri kepentingan yang terjadi antara agen dan prinsipal. Masyarakat (prinsipal) memberikan amanat atau kewenangan kepada pemerintah daerah (agen) untuk dapat menjalankan pemerintahan. Pemerintah daerah (agen) juga mempunyai tanggungjawab kepada masyarakat (prinsipal) untuk melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan semua aktivitas yang telah dilaksanakan dalam suatu periode. Maka demikian, masyarakat dapat menilai dan mengawasi sejauhmana pemerintah menjalankan amanat demi kepentingan masyarakat (prinsipal).

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Analisis Transparansi Terhadap Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Website Pemerintah Daerah

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardismo, 2006). Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di dalam Kerangka Konseptual, menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Ketersediaan bagi publik atas informasi komprehensif mengenai sektor keuangan public pada waktu tertentu merupakan salah satu prinsip transparansi (*International Monetary Fund, 2001*). Oleh sebab itu penelitian ini mengasumsikan hipotesis seperti berikut:

H1: Transparansi laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan pada *website* pemda

Analisis Akuntabilitas Terhadap Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Website Pemerintah Daerah

Berlandaskan pendapat Mardiasmo (2009), akuntabilitas merupakan tugas amanah untuk memastikan pertanggung jawaban dengan penyajian serta pengungkapan semua aktivitas serta kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya terhadap pihak yang mempercayai amanah yang mempunyai kuasa serta kewajiban untuk menerima tanggungjawab tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini mengasumsikan hipotesis seperti berikut:

H2: Akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan pada *website* pemda

Analisis Aksesibilitas Terhadap Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Website Pemerintah Daerah

Aksesibilitas dalam perspektif spasial merupakan tersedianya koneksi dari satu tempat menuju tempat lainnya ataupun kemudahan bagi seseorang dalam berpindah dari satu tempat menuju tempat lainnya dengan rasa nyaman, aman dan dengan tempo normal (Rohman, 2009). Sementara Sagala (2011) berpendapat aksesibilitas laporan keuangan adalah peluang dalam memberi akses informasi keuangan kepada pihak yang mempunyai kepentingan (*stakeholders*) secara mudah serta ekonomis. Oleh sebab itu penelitian ini mengasumsikan hipotesis seperti berikut:

H3: Aksesibilitas berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan pada *website* pemda

Analisis Jumlah Penduduk Terhadap Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Website Pemerintah Daerah

Besarnya pelayanan publik yang diberikan pemda untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan penduduknya ditentukan oleh jumlah penduduk wilayah tersebut. Semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah akan semakin tinggi juga tanggung jawab serta pelayanan yang diberikan pemda untuk memaksimalkan kesejahteraan penduduknya seperti yang disyaratkan oleh UU No. 32 tahun 2004.

Garcia-Sanchez et al., (2013) mendapati ikatan positif yang signifikan diantara jumlah penduduk dengan tingkat pengungkapan informasi non finansial di *website* pemda. Penelitian yang dilakukan oleh Garcia (2010) bersama Martani et al., (2013) juga menggunakan jumlah penduduk menjadi proksi untuk ukuran daerah serta mendapati ikatan positif yang signifikan diantara ukuran daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemda.

Daerah dengan populasi besar akan tunduk pada pemeriksaan publik yang lebih besar juga, serta pemangku kepentingan yang lebih bervariasi. Pemangku kepentingan yang bervariasi mempunyai preferensi serta keperluan informasi yang berbeda. Sebab akuntabilitas pelayanan yang disediakan dan tingginya dan tekanan permintaan yang tinggi terhadap informasi kinerja pemerintah karena banyaknya pemangku kepentingan, pemerintah daerah yang lebih tinggi akan menerbitkan lebih banyak informasi. *Website* resmi Pemerintah Daerah adalah salah satu sarana yang dipakai dalam mengungkapkan informasi pemerintah. Oleh sebab itu penelitian ini mengasumsikan hipotesis seperti berikut:

H4: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan pada *website* pemda

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas pengungkapan laporan keuangan berbasis *website*. Transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan jumlah penduduk digunakan sebagai variabel independen.

Tabel 1
Pengukuran Variabel

No.	Pengukuran Variabel	Sumber
1.	$DISC = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total item yang harus diungkapkan}} \times 100\%$	Lesmana (2010)
2.	TRANS = Kegiatan Pemerintah dan LKPD	Martini et al. (2013)
3.	ACT = APBD, Dana Hibah serta Bansos, LK tepat waktu, pemeriksaan BPK RI	Martini et al. (2013) dan Krina (2003)
4.	ACCESS = Penyajian dalam <i>website</i>	Styles et al. (2007)
5.	POP = Ln Jumlah Penduduk	Naopal et al. (2017)

Populasi dan Sampel

Seluruh kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan total 9 kabupaten/kota menjadi populasi penelitian pada riset ini. Pada penelitian ini, data yang

dikumpulkan yaitu data sekunder yang didapatkan dari *website* pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2018-2021. Metode yang digunakan untuk memilih sampel yaitu *purposive sampling*, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan. Dari kriteria pengambilan sampel tersebut, diperoleh 36 sampel pengamatan.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan Teknik studi dokumentasi dengan bantuan *software* SPSS 25.0. Penelitian ini menggunakan metode analisis sebagai berikut: (1) Analisis statistik deskriptif; (2) Uji asumsi klasik; (3) Uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TRANS	36	.04	.22	.0845	.04278
ACT	36	.04	.13	.0737	.03419
ACCESS	36	.13	.39	.2609	.07495
POP	36	128290,00	1343901,00	560710,4167	356698,37433
DISC	36	.22	.74	.4191	.11153
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Pada tabel analisis statistik deskriptif di atas dapat dilihat hasil bahwa jumlah sampel (n) yang digunakan sebanyak 36 sampel, dimana dari 36 sampel tersebut terdapat kualitas pengungkapan (DISC) dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.42 atau 42% dengan nilai maksimal 0.74 atau 74% dan nilai minimal 0.22 atau 22%. Pada variabel transparansi laporan keuangan pemerintah daerah terlihat dimana rata-rata pemerintah daerah mempunyai transparansi sebesar 0.08 dengan nilai tertinggi sebesar 0.22 serta nilai terendah sebesar 0.04, dengan nilai standar deviasi 0.04 yang lebih kecil dari nilai *mean* sebesar 0.08 mengidentifikasi bahwa transparansi laporan keuangan tersebut baik.

Kemudian pada variabel akuntabilitas (ACT) mempunyai rata-rata nilai sebesar 0.07 berarti bahwa rata-rata akuntabilitas yang dalam laporan keuangan keuangan pemerintah daerah sebesar 7% dengan nilai minimum 0.04 serta nilai maksimum sebesar 0.13 atau 13%, dengan nilai standar deviasi sebesar 0.03 yang berarti lebih rendah dari pada nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.07 menandakan bahwa data akuntabilitas tersebut baik. Pada variabel aksesibilitas (ACCESS) nilai rata-rata (*mean*) yang dipunya sebesar 0.26 dengan nilai tertinggi sebesar 0.39 atau 39% dengan nilai terendah sebesar 0.13.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas dan Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2
Ringkasan Uji Normalitas dan Uji Heteroskedastisitas

Pengujian	Hasil	Keterangan
Uji Normalitas	Penyebaran data sekitar dan mengikuti garis diagonal	Data terdistribusi normal

Uji Heteroskedastisitas	Penyebaran data merata dan tidak membentuk pola tertentu	Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas
-------------------------	--	---

Sumber: data sekunder yang diolah, 2022

Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Transparansi (TRANS)	.626	1,598	Bebas dari multikolinearitas
Akuntabilitas (ACT)	.992	1,008	Bebas dari multikolinearitas
Aksesibilitas (ACCESS)	.606	1,650	Bebas dari multikolinearitas
Jumlah Penduduk (POP)	.895	1,117	Bebas dari multikolinearitas
Variabel Dependen: DISC			

Sumber: data sekunder yang diolah, 2022

Sesuai dengan Ghazali (dalam Chasanah dan Sagoro, 2017) yang mengungkapkan jika angka *Tolerance* berada di atas nilai sepuluh serta VIF berada di bawah nilai sepuluh persen dapat diartikan tidak terdapat keberadaan multikolinearitas pada model regresi yang dipergunakan.

Uji Autokorelasi

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin Watson	Du	4-Du	Keterangan
1	2.08	1.73	2.27	Bebas dari autokorelasi

Sumber: data sekunder yang diolah, 2022

Hasil regresi Durbin-Watson sebanyak 2.08, diperbandingkan dengan nilai tabel melalui derajat kepercayaan 0.05 atau lima persen dengan sampel sebesar 36 dan empat variabel independen ($k=4$) dan didapatkan DU tabel sebanyak 1.73. Kemudian dihitung $4 - DU$ yaitu $4 - 1.73$ dan mendapatkan hasil sebesar 2.27 sehingga keberadaan nilai DW pada pertengahan diantara nilai DU dengan nilai $4 - DU$ menandakan model regresi yang dipergunakan layak karena bebas dari autokorelasi.

Uji Hipotesis

Tabel 5
Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.999 ^a	.998	.998	.01158
a. Predictors: (Constants), POP, ACT, TRANS, ACCESS				
b. Variabel Dependen: DISC				

Sumber: data sekunder yang diolah, 2022

Tabel 6
Hasil Uji F

Model	F	Sig.
1 Regression	2458,459	.000^b
a. Variabel Dependen: DISC		
b. Predictors: (Constant), TRANS, ACT, ACCESS, POP		

Sumber: data sekunder yang diolah, 2022

Tabel 7
Hasil Uji t

Variabel	Unstandardized B	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	1,116			
TRANS	.195	27,116	.000	Signifikan
ACT	.197	32,731	.000	Signifikan
ACCESS	.591	52,091	.000	Signifikan
POP	.102	2,086	.000	Signifikan

Sumber: data sekunder yang diolah, 2022

Interpretasi Hasil Transparansi

Hasil uji parsial membuktikan bahwa nilai t-hitung transparansi adalah sebesar 27,116 dimana signifikan transparansi sebesar 0,000 lebih rendah dibandingkan taraf signifikan sebesar 0,05. Ini artinya, transparansi berpengaruh positif serta signifikan atas kualitas pengungkapan laporan keuangan pemda. Menurut hasil tersebut, sehingga hipotesis pertama yang mengasumsikan transparansi berpengaruh positif atas kualitas pengungkapan laporan keuangan diterima. Hasil yang didapat menunjukkan jika semakin baik transparansi laporan keuangan berarti semakin baik juga kualitas pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini pada variabel transparansi mendukung temuan Septem dan Herlina (2020) yang menerangkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan. Kesimpulan ini selaras dengan temuan Indra Agung Wilopo (2017), menyatakan bahwa transparansi berpengaruh secara positif terhadap informasi keuangan daerah melalui *website*. Menurut I Made Pradana Adiputra (2018), menyatakan transparansi berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Akuntabilitas

Hasil uji parsial membuktikan nilai t-hitung transparansi sebesar 32,731, untuk nilai signifikan transparansi mempunyai nilai sebesar 0,000 lebih rendah dibandingkan taraf signifikan sebesar 0,05. Ini artinya, akuntabilitas berpengaruh positif serta signifikan atas kualitas

pengungkapan laporan keuangan pemda. Menurut hasil tersebut hipotesis kedua yaitu akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan diterima.

Dijelaskan juga dalam hasil tersebut jika akuntabilitas laporan keuangan yang semakin baik akan menciptakan kualitas pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang semakin baik juga. Menurut Mardiasmo (2009), meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik berdampak pada kewajiban pemerintah untuk menyampaikan dan menyediakan laporan keuangan sinkron berdasar SAP yang menunjukkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Lengkapnya penyajian informasi pada laporan keuangan mewujudkan transparansi yang kelak dapat menciptakan akuntabilitas jika laporan keuangan yang disajikan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan bagi publik serta para pengambil keputusan (Nordriawan, 2010).

Menurut penelitian Septem dan Herlina (2020) menyebutkan bahwa akuntabilitas secara positif berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan pada *website* dan penelitian dengan variabel akuntabilitas ini mendukung kesimpulan tersebut. Selaras dengan hal tersebut, Indra Agung Wilopo (2017) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan pada informasi keuangan daerah melalui *website*.

Aksesibilitas

Hasil tersebut menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan yang semakin baik akan mewujudkan penyelenggaraan keuangan daerah tersedia semakin baik pula. Untuk mengawali terwujudnya pengungkapan laporan keuangan yang baik, pemda perlu memberikan pengguna laporan keuangan kemudahan akses serta memberi kemudahan aksesibilitas kepada pengguna laporan keuangan yang bersangkutan.

Pengungkapan laporan keuangan yang baik bergantung pada akses publik ke laporan yang dapat dipertanggung jawabkan serta hasil pelaporan yang mudah dibaca juga dipahami. Dari sudut pandang Mulyana (2006) akses yang dibagikan bisa berbentuk media semacam majalah, surat kabar, stasiun televisi, radio, *website* (internet) serta forum yang membagikan fokus atau peran langsung yang memotivasi pemerintah untuk bertanggung jawab kepada masyarakat.

Menurut Ikhlas dan Dwi Ratmono (2015) aksesibilitas dalam pengungkapan laporan keuangan berdampak positif terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah melalui *website*. Temuan ini sejalan dan memperkuat temuan penelitian sebelumnya.

Jumlah Penduduk

Hasil penelitian menunjukkan jika variabel populasi (POP) mempunyai koefisien beta sebesar 0.102 dengan p-value sebesar 0.38 (signifikan). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 28 jumlah penduduk berbanding lurus terhadap keperluan masyarakat akan pelayanan. Jumlah penduduk suatu daerah kabupaten/kota berbanding lurus terhadap tingkat pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan jika variabel populasi (POP) berpengaruh signifikan atas tingkat pengungkapan laporan keuangan pemda di Nusa Tenggara Barat.

Besarnya jumlah penduduk memerlukan beragam pendukung dalam menjamin kepuasan masyarakat. Pemerintah daerah berupaya untuk mempublikasikan semua informasi dalam laporan keuangan sebagai manfaat pelayanan terhadap masyarakat. Searah dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan positif antara jumlah penduduk terhadap cakupan pengungkapan (Hendriyani dan Tahar, 2015).

Menurut temuan penelitian Adelina Chairani, Wahyudi Tertiaro, Sari Rela (2021) menyebutkan bahwa jumlah penduduk secara positif berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada *website* dan penelitian ini mendukung kesimpulan tersebut. Selaras dengan hal tersebut, Ririn Hendriyani dan Afrizal Tahar (2015) juga menyebutkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan pada tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah melalui *website*.

KESIMPULAN

Bersumber dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi berpengaruh signifikan atas kualitas pengungkapan laporan keuangan pada *website* pemerintah daerah
2. Akuntabilitas berpengaruh signifikan atas kualitas pengungkapan laporan keuangan pada *website* pemerintah daerah
3. Aksesibilitas berpengaruh signifikan atas kualitas pengungkapan laporan keuangan pada *website* pemerintah daerah
4. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan atas kualitas pengungkapan laporan keuangan pada *website* pemerintah daerah

Pada penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yang terdiri dari: 1) Penelitian ini hanya menggunakan kurun waktu selama 4 tahun yakni 2018 hingga 2021 untuk data laporan keuangan pemda di provinsi Nusa Tenggara Barat; 2) Penelitian ini hanya mengkaji variabel transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan jumlah penduduk. Berdasarkan keterbatasan yang telah disebutkan, maka saran yang bisa peneliti berikan antara lain: 1) Untuk penelitian berikutnya dapat menambah jumlah tahun yang lebih banyak serta memperluas sampel penelitian, karena sampel yang banyak akan berpengaruh pada hasil penelitian dan dapat memberikan gambaran serta perkembangan yang lebih terkini; 2) Untuk penelitian berikutnya bisa memperbanyak jumlah variabel yang akan diteliti, karena variabel yang banyak mampu meningkatkan luas pengungkapan serta jumlah informasi.

REFERENSI

- Adelina Chairani, Wahyudi Tertiaro, S. R. (2021). *Factors Affecting Disclosure Of Financial Statements On Local Government Websites In Indonesia*. 1(January), 6.
- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>
- Agustinus Salle. (2011). *Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. 4(1), 88–100.
- Al Asyari, S., & Helmy, H. (2020). Analisis Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2314–2330.
- Arifin, J. (2020). Disclosure of financial statements on the website: An empirical study in Indonesian local governments. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 9(2), 174–188. http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_9-s2_35_s19-152_174-188.pdf
- Asliyanti. (2015). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Dan Aksesibilitas Dalam Menciptakan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara. *Ekp*, 13(3), 1576–1580.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggara. In *Demographic Research*.
- Budiarto, D. S., & Indarti, L. (2019). Apakah Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Pada Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? Riset Pada Kabupaten Di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1). <https://doi.org/10.30813/jab.v12i1.1549>
- Cheisviyanny, C., Helmy, H., & Dwita, S. (2018). Analisis Kualitas Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 6(3), 1087–1104. <http://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/274>
- Darmawan, A. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Deko Anggoro Akbar, D. (2014). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Perusahaan Berbasis Website. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Fuji Nurabila. (2015). *Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (

- Lkpd). candra maulana.
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(1), 25–33.
- Herawati. (2019). Pengaruh Karakteristik Dan Kompleksitas Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. *Carbohydrate Polymers*, 6(1), 5–10.
- Jordan, M. M. (2016). *THE TRANSPARENCY OF COUNTY WEBSITES: A CONTENT ANALYSIS*. 37(1), 103–128.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Muhammad Irvan Syahputra. (2019). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bengkalis*.
- Maulana, C. (2015). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd). In *Universitas Negeri Semarang*.
- Menteri Komunikasi dan Informatika. (2006). *Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio*.
- Narulitasari, D., & Zafira, R. (2021). Determinant of Internet Financial Reporting Disclosure. *Islamic Accounting Journal*, 1(2), 15–27. <https://practiceojs2.iainsalatiga.ac.id/index.php/iaj/article/view/6557%0Ahttps://practiceojs2.iainsalatiga.ac.id/index.php/iaj/article/viewFile/6557/2023>
- Nor, W., Huda, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites: A quest of its determinant(s). *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 112–128. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2019-0043>
- Nosihana, A. (2016). *Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia*. 3(2), 87–101.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Inpres Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. In *09 Desember*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 A Tahun 2007 tentang Tatacara Penyampaian Informasi Dan Tanggapan Atau Saran Dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. In *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan*. www.bphn.go.id
- Ramdhani, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Propinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2). <https://doi.org/10.35448/jrat.v9i2.4301>
- Rizky Novananda Fauzan Hasibuan, D. M. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi*. 11(2008), 1–7.
- Rofifah, D. (2020). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah Di Kalimantan. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1, 12–26.
- Satria, D. I., & Bobby, M. A. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 73. <https://doi.org/10.29103/jak.v6i2.1826>
- Sumartono, S., & Pasolo, M. R. (2019). The factors of financial report transparency in the regional government. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss1.art2>



Wilopo, I. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas & Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), 61. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).61-78](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).61-78)